

SKRIPSI

**PENGARUH PENGELOAAN KEUANGAN, SISTEM
PENGENDALIAN INTERNAL, DAN *GOOD
GOVERNANCE* PADA KINERJA BADAN PEMERIKSA
KEUANGAN RI**



DIAJUKAN OLEH :

NAMA : NAJMI ARDHIANNISA

NIM : 125239226

**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MENCAPIAI GELAR SARJANA EKONOMI**

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA**

2025

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Persetujuan

Nama : NAJMI ARDHIANNISA
NIM : 125239226
Program Studi : AKUNTANSI BISNIS
Judul : Pengaruh Pengelolaan Keuangan, Sistem Pengendalian Internal, dan Good Governance terhadap Kinerja BPK RI

Skripsi ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 24-Juni-2025

Pembimbing:
ELSA IMELDA, S.E..Ak., M.Si., CA.
NIK/NIP: 10101018



HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Pengesahan

Nama : NAJMI ARDHIANNISA
NIM : 125239226
Program Studi : AKUNTANSI BISNIS
Judul Skripsi : Pengaruh Pengelolaan Keuangan, Sistem Pengendalian Internal, dan Good Governance terhadap Kinerja BPK RI
Title : The Influence of Financial Management, Internal Control System, and Good Governance on the Performance of the Audit Board of Indonesia

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi AKUNTANSI BISNIS Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Tarumanagara pada tanggal 12-Juli-2025.

Tim Penguji:

1. HERLIN TUNDJUNG SETIJANINGSIH, Dr. S.E., Ak., M.Si, CA.
2. ELSA IMELDA, S.E..Ak., M.Si., CA.
3. AGUSTIN EKADJAJA, S.E., M.Si., Ak., CA.

Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

Pembimbing:

ELSA IMELDA, S.E..Ak., M.Si., CA.
NIK/NIP: 10101018



Jakarta, 12-Juli-2025

Ketua Program Studi



HENDRO LUKMAN, Dr. SE,MM,Akt,CPMA, CA,CPA (Aust.)

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat, taufiq, serta hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul "Pengaruh Pengelolaan Keuangan, Sistem Pengendalian Internal, Dan *Good Governance* terhadap Kinerja BPK", yang disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tarumanagara.

Penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari dukungan, bimbingan, serta bantuan dari berbagai pihak yang telah memberikan kontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, dengan penuh rasa hormat dan ketulusan, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Elsa Imelda, S.E., A.k., M.Si., CA, selaku dosen pembimbing yang telah memberikan kesempatan, bimbingan, arahan, serta meluangkan waktu dan pemikirannya dengan penuh kesabaran dari awal hingga akhir penyusunan skripsi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
2. Bapak Prof. Dr. Sawidji Widoatmodjo, S.E., M.M., M.B.A., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara, yang telah memberikan dukungan dan fasilitas dalam proses perkuliahan serta penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Hendro Lukman, S.E., M.M., Ak., CPMA., CA., CPA (Aust.), CSRS., ACPA., selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara, yang telah memberikan arahan dan motivasi selama masa studi penulis.
4. Kedua orang tua penulis yang telah menjadi sumber kekuatan, memberikan dukungan tiada henti, serta mendidik dan membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang. Segala doa dan pengorbanan yang telah diberikan tidak akan pernah dapat terbalaskan oleh penulis.

5. Saudara penulis, yang senantiasa memberikan doa, semangat, serta keceriaan dalam setiap langkah perjalanan penulis.
6. Teman dan sahabat penulis, *Itama Untar* dan terkhusus *nonton*.
7. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah memberikan bantuan, inspirasi, serta dukungan yang berarti selama proses penulisan skripsi ini maupun selama menempuh pendidikan di Universitas Tarumanagara.

Akhir kata, penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki. Oleh karena itu, penulis dengan tulus mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif dari para pembaca demi penyempurnaan di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya serta menjadi kontribusi positif dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang akuntansi.

Jakarta, Juni 2025

Peneliti,

Najmi Ardhiannisa

UNIVERSITAS TARUMANAGARA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

JAKARTA

PENGARUH PENGELOLAAN KEUANGAN, SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, DAN *GOOD GOVERNANCE* TERHADAP KINERJA BPK

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengelolaan keuangan, sistem pengendalian internal, dan good governance terhadap kinerja pada BPK RI. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kuantitatif deskriptif dengan pengumpulan data primer melalui penyebaran kuesioner kepada 101 pegawai BPK yang telah bekerja minimal satu tahun dan terlibat dalam manajemen kinerja atau keuangan. Metode analisis yang digunakan adalah SEM-PLS menggunakan software SmartPLS 4.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga variabel independen, yaitu pengelolaan keuangan, sistem pengendalian internal, dan good governance berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja BPK. Pengelolaan keuangan yang baik berkontribusi pada efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran, sistem pengendalian internal meningkatkan keandalan pelaporan dan kepatuhan terhadap regulasi, serta praktik good governance memperkuat akuntabilitas dan transparansi lembaga.

Kata kunci : Pengelolaan Keuangan, Sistem Pengendalian Internal, *Good Governance*, Kinerja, BPK

TARUMANAGARA UNIVERSITY

FACULTY OF ECONOMICS AND BUSINESS

JAKARTA

***THE INFLUENCE OF FINANCIAL MANAGEMENT, INTERNAL
CONTROL SYSTEM, AND GOOD GOVERNANCE ON THE
PERFORMANCE OF THE AUDIT BOARD OF INDONESIA***

ABSTRACT

This study aims to analyze the influence of financial management, internal control systems, and good governance on the performance of BPK RI. A descriptive quantitative approach was used, with primary data collected through questionnaires distributed to 101 BPK employees who had worked for at least one year and were involved in performance or financial management. The data were analyzed using SEM-PLS approach, utilizing the SmartPLS 4.0 software. The results show that all three independent variables—financial management, internal control systems, and good governance have a positive and significant impact on BPK's performance. Effective financial management contributes to the efficiency and effectiveness of budget utilization; strong internal control systems enhance the reliability of reporting and regulatory compliance; and good governance practices reinforce institutional accountability and transparency.

Keywords: Financial Management, Internal Control System, Good Governance, Performance, Audit Board of Indonesia

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iii
ABSTRAK.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Permasalahan	1
1. Latar belakang.....	1
2. Identifikasi Masalah	3
3. Batasan Masalah	8
4. Rumusan masalah	8
B. Tujuan dan Manfaat	9
1. Tujuan Penelitian	9
2. Manfaat Penelitian	9
BAB II LANDASAN TEORI.....	10
A. Gambaran Umum Teori.....	10
B. Definisi Konseptual Variabel	11
1. Kinerja.....	11
2. Pengelolaan Keuangan Negara	12
3. Sistem Pengendalian Internal.....	13
4. Good Governance	14
C. Kaitan antara Variabel	15
1. Hubungan Pengelolaan Keuangan dengan Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan RI	15

2. Hubungan Sistem Pengendalian Internal dengan Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan RI	16
3. Hubungan <i>Good Governance</i> Government dengan Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan RI.....	17
D. Penelitian Terdahulu.....	18
E. Kerangka Pemikiran dan Hipotesis.....	21
1. Hubungan Pengelolaan keuangan dengan Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan RI	21
2. Hubungan Sistem Pengendalian Internal dengan Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan RI	21
3. Hubungan <i>Good Governance</i> dengan Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan RI.....	22
BAB III METODE PENELITIAN	24
A. Desain Penelitian.....	24
B. Populasi, Teknik Pemilihan Sampel dan Ukuran Sampel.....	24
1. Populasi	24
2. Teknik Pemilihan Sampel	25
3. Ukuran Sampel.....	25
C. Operasionalisasi Variabel dan Instrumen	26
D. Teknik Pengolahan Data	28
1. Uji Statistik Deskriptif	29
2. Uji Instrumen Penelitian (Analisa Outer Model).....	29
E. Pengujian Model Struktural (Inner Model).....	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
A. Deskripsi Responden.....	34
1. Umur	34
2. Jenis Kelamin.....	35
3. Jabatan.....	35
4. Asal Satuan Kerja.....	36
5. Lama Bekerja di BPK	37
B. Deskripsi Objek Penelitian.....	37

1. Pengelolaan Keuangan.....	38
2. Sistem Pengendalian Internal.....	38
3. Good Governance	39
4. Kinerja BPK.....	40
C. Statistik Deskriptif Variabel	40
D. Analisis Inferensial	41
1. Outer Model	42
2. Inner Model.....	50
E. Pembahasan.....	54
1. Pengaruh Pengelolaan Keuangan terhadap Kinerja BPK RI	54
2. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Kinerja BPK RI	56
3. Pengaruh <i>Good Governance</i> terhadap Kinerja BPK RI.....	57
BAB V PENUTUP	59
A. Kesimpulan	59
B. Keterbatasan dan Saran	61
1. Keterbatasan.....	61
2. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA.....	62
LAMPIRAN.....	67
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	76
HASIL TURNITIN	77
SURAT PERNYATAAN	78

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Perkembangan Hasil Evaluasi AKIP dan Target Renstra BPK 2020-2024	4
Tabel 2. 1 Tabel Penelitian Yang Relevan.....	18
Tabel 3. 1 Operasionalisasi Variable	26
Tabel 3. 2 Keterangan Skala Likert.....	28
Tabel 4. 1 Jumlah Responden dan Data	34
Tabel 4. 2 Karakteristik Responden Berdasarkan Umur.....	35
Tabel 4. 3 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	35
Tabel 4. 4 Karakteristik Responden Berdasarkan Jabatan	36
Tabel 4. 5 Karakteristik Responden Berdasarkan Asal Satuan Kerja	36
Tabel 4. 6 Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Bekerja di BPK.....	37
Tabel 4. 7 Tanggapan Responden Terhadap Indikator Variabel Pengeloaan Keuangan	38
Tabel 4. 8 Tanggapan Responden Terhadap Indikator Variabel Sistem Pengendalian Internal	38
Tabel 4. 9 Tanggapan Responden Terhadap Indikator Variabel Kesadaran Perpajakan.....	40
Tabel 4. 10 Tanggapan Responden Terhadap Indikator Variabel Kinerja BPK	40
Tabel 4. 11 Hasil Uji Statistik Deskriptif	41
Tabel 4. 12 Hasil Estimasi Outer Loading untuk Indikator KN.3 dan KN.7	43
Tabel 4. 13 Hasil Estimasi Outer Loading Tahap 2	43
Tabel 4. 14 Hasil Estimasi Average Variance (AVE)	45
Tabel 4. 15 Hasil Uji HTMT (Heterotrait-Monotrait Ratio of Correlations).....	46
Tabel 4. 16 Hasil Uji Cornbach's Alpha	47
Tabel 4. 17 Hasil Uji Reliabilitas	47
Tabel 4. 18 Hasil Uji Model Fit	48
Tabel 4. 19 Hasil Uji R-Square	50
Tabel 4. 20 Hasil Uji signifikansi hubungan.....	52
Tabel 4. 21 Hasil Uji Effect size (f)	53
Tabel 4. 22 Rangkuman Hasil Uji Hipotesis.....	54

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran.....	23
Gambar 4. 1 model latent variable penelitian	42
Gambar 4. 2 output PLS SEM Algorithm	51

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Responden	67
Lampiran 2 Pertanyaan Kuesioner	70
Lampiran 3 Hasil Uji Outer Loading Tahap 1.....	73
Lampiran 4 Hasil Uji Outer Loading Tahap 2.....	74
Lampiran 5 Hasil Uji Construct Reability And Validity	74
Lampiran 6 Hasil Uji HTMT (Heterotrait-Monotrait Ratio).....	75
Lampiran 7 Hasil Uji Model Fit.....	75
Lampiran 8 Hasil Uji R-Square.....	75
Lampiran 9 Hasil Uji F-Square	75
Lampiran 10 Hasil Uji Path Coefficents	75

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Permasalahan

1. Latar belakang

Membangun tata kelola pemerintahan yang baik bertumpu pada banyak pilar, salah satunya adalah pengelolaan keuangan pemerintah yang transparan dan akuntabel. Fungsi strategis lembaga independen yang dikenal dengan nama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam skenario ini adalah untuk mengawasi pengelolaan dan akuntabilitas keuangan negara. Pembentukan BPK merupakan amanat dari Pasal 23E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang bertujuan untuk mengawasi pengelolaan keuangan negara secara baik dan efisien sesuai dengan semua peraturan perundang-undangan yang relevan. Lebih rinci, BPK bertanggung jawab untuk mengawasi pengelolaan keuangan negara oleh berbagai entitas seperti Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan organisasi sejenis lainnya. Peran tersebut diuraikan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006. Selain itu, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 ayat (3), pemeriksaan BPK meliputi pemeriksaan keuangan, kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Dalam hal pelaporan pengelolaan dan transparansi keuangan publik Indonesia, BPK merupakan satu-satunya lembaga auditor eksternal yang mempunyai kewenangan besar memberikan opini. Temuan audit BPK selanjutnya dikirimkan kepada wakil rakyat yang tepat—dalam perihal ini DPR, DPD, dan DPRD—sesuai dengan prosedur yang diamanatkan untuk penyelidikan lebih lanjut. Jika bendahara negara, pengelola keuangan negara, atau badan yang bertanggung jawab untuk mengelola keuangan negara melakukan tindakan melawan hukum, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, BPK dapat menilai dan/atau menetapkan sejauh mana kerugian negara tersebut.

Karena kedudukan dan kewenangannya, Badan Pemeriksa Keuangan Indonesia merupakan komponen integral dalam upaya memastikan pemerintahan yang baik dan bersih di Indonesia. Publik terutama memperhatikan kinerja BPK untuk menentukan penggunaan kepercayaan publik yang tepat, mengingat peran penting BPK dalam meminta pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara.

Sebagai institusi yang menjamin akuntabilitas publik, kinerja BPK harus senantiasa dijaga dan ditingkatkan agar hasil pemeriksaan dapat memberikan rekomendasi yang tepat, objektif, dan berdampak positif bagi pengelolaan keuangan negara. Dalam menghadapi tantangan lingkungan strategis yang terus berkembang seperti kompleksitas transaksi keuangan, digitalisasi informasi, serta tuntutan transparansi publik, BPK memerlukan fondasi yang kuat dari segi internal, baik itu dalam hal manajemen sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, maupun efektivitas sistem pengawasan. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji hal-hal yang dapat memengaruhi kinerja BPK agar dapat diketahui area mana yang perlu diperkuat, serta untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data.

Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang buruk dapat memberikan dampak yang signifikan, baik terhadap tata kelola keuangan negara maupun kepada kepercayaan publik. Sebagai lembaga yang memiliki mandat konstitusional untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, buruknya kinerja BPK dapat menyebabkan menurunnya kualitas pemeriksaan, lemahnya pengawasan terhadap penggunaan anggaran, serta berkurangnya efektivitas rekomendasi hasil pemeriksaan.

Karena sifat dasarnya yang tidak mencari profit, penelitian (Jitmau et al., 2017) menjelaskan bahwa keberhasilan Kinerja lembaga pemerintahan, termasuk BPK, tidak hanya diukur dari surplus atau defisit hasil laporan keuangannya saja, tetapi juga dari akuntabilitas, transparansi, dan tingkat keberhasilan pencapaian tujuan strategis yang telah ditetapkan sebuah organisasi. Pada penelitian (Rahmani, 2023) menyebutkan bahwa Kinerja sebuah instansi pemerintah mencerminkan sejauh mana sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sejalan

dengan visi, misi, dan strategi instansi tersebut dapat berhasil tercapai. Kinerja ini mencerminkan tingkat kesuksesan atau kegagalan dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

2. Identifikasi Masalah

Salah satu tantangan yang dihadapi BPK dalam menjalankan tugasnya adalah kasus dugaan korupsi yang melibatkan beberapa oknum auditor. Dalam beberapa tahun ke belakang, terdapat kasus korupsi berindikasi suap dengan keterlibatan oknum sebagian pemeriksa BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat terkait pemberian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada laporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Saat ini beberapa oknum pemeriksa tersebut telah dinonaktifkan (sumber: cnnindonesia.com, 2022). Kasus ini membuat publik mempertanyakan integritas dan kredibilitas Lembaga BPK, yang secara langsung memengaruhi persepsi masyarakat kepada kinerja BPK secara keseluruhan.

Kinerja BPK RI merupakan refleksi dari kapabilitas lembaga dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemeriksaan pengelolaan keuangan negara. Pengukuran kinerja tersebut dapat dilaksanakan melalui Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) untuk semua unit kerja yang ada di BPK yang dilaksanakan oleh inspektorat utama BPK selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Tujuan evaluasi ini adalah untuk menilai pelaksanaan AKIP dan memotivasi unit kerja di lingkungan BPK agar meningkatkan kinerjanya. Hasil pengukuran dan perkembangan nilai evaluasi ini untuk setiap Unit Kerja pada BPK dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. 1**Perkembangan Hasil Evaluasi AKIP dan Target Renstra BPK 2020-2024**

Unit Kerja	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Ditama Renvaja PKN	Target	A (86,00)	A (87,00)	A (88,00)	A (89,00)	AA (90,05)
	Realisasi	AA (92,79)	AA (93,86)	A (86,72)	AA (90,40)	AA (91,90)
	Capaian	107,89%	107,89%	98,55%	101,57%	102,05%
AKN I	Target	A (86,00)	A (87,00)	A (88,00)	A (89,00)	AA (90,05)
	Realisasi	A (85,82)	A (87,35)	AA (90,67)	A (88,90)	AA (92,90)
	Capaian	99,79%	100,40%	103,03%	99,89%	103,16%
AKN II	Target	A (86,00)	A (87,00)	A (88,00)	A (89,00)	AA (90,05)
	Realisasi	A (89,44)	A (89,63)	AA (93,46)	A (88,90)	AA (91,30)
	Capaian	104%	103,02%	106,20%	99,89%	101,39%
AKN III	Target	A (86,00)	A (87,00)	A (88,00)	A (89,00)	AA (90,05)
	Realisasi	AA (91,83)	AA (92,70)	AA (94,64)	AA (92,30)	AA (90,40)
	Capaian	106,78%	106,55%	107,55%	103,71%	100,39%
AKN IV	Target	A (86,00)	A (87,00)	A (88,00)	A (89,00)	AA (90,05)
	Realisasi	AA (90,50)	AA (91,24)	AA (93,59)	AA (92,30)	AA (91,30)
	Capaian	105,23%	104,87%	106,35%	103,71%	101,39%
AKN V	Target	A (86,00)	A (87,00)	A (88,00)	A (89,00)	AA (90,05)
	Realisasi	AA (91,57)	AA (94,87)	A (89,44)	A (88,90)	AA

Unit Kerja	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
						(93,80)
	Capaian	106,47%	105,35%	101,64%	99,89%	104,16%
AKN VI	Target	A (86,00)	A (87,00)	A (88,00)	A (89,00)	AA (90,05)
	Realisasi	A (89,19)	AA (93,16)	AA (94,48)	89,80	AA (90,40)
	Capaian	103,71%	107,08%	107,36%	100,90%	100,39%
AKN VII	Target	A (86,00)	A (87,00)	A (88,00)	A (89,00)	AA (90,05)
	Realisasi	A (89,22)	AA (92,46)	AA (90,80)	A (88,90)	AA (90,40)
	Capaian	103,75%	106,28%	103,18%	99,89%	100,39%
AUI	Target	A (86,00)	A (87,00)	A (88,00)	A (89,00)	AA (90,05)
	Realisasi	A (92,24)	AA (96,48)	AA (93,84)	AA (92,30)	AA (91,30)
	Capaian	107,26%	110,90%	106,64%	103,71%	101,39%
Inspektorat Utama	Target	A (86,00)	A (87,00)	AA (91,00)	AA (91,00)	AA (90,05)
	Realisasi	A (90,76)	AA (95,94)	AA (92,80)	AA (90,85)	AA (94,15)
	Capaian	105,53%	110,28%	101,98%	99,84%	104,55%
Badiklat PKN	Target	A (86,00)	A (87,00)	A (88,00)	A (89,00)	AA (90,05)
	Realisasi	AA (92,38)	AA (92,59)	AA (90,57)	AA (91,40)	AA (92,90)
	Capaian	107,42%	106,43%	102,92%	102,7%	103,16%
Ditama Binbang kum	Target	A (86,00)	A (87,00)	A (88,00)	A (89,00)	AA (90,05)
	Realisasi	A (89,54)	AA (96,33)	AA (91,13)	AA (91,40)	AA

Unit Kerja	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
						(92,90)
Sekretariat Jenderal	Capaian	104,12%	110,72%	103,56%	102,7%	103,16%
	Target	A (86,00)	A (87,00)	A (88,00)	A (89,00)	AA (90,05)
	Realisasi	AA (94,94)	AA (95,95)	AA (95,10)	AA (92,90)	AA (95,30)
	Capaian	110,40%	110,29%	108,07%	104,38%	105,83%

Menurut data Hasil Evaluasi AKIP yang ditampilkan dalam Laporan Kinerja BPK Tahun 2024 yang diunggah pada laman resminya, realisasi pada beberapa Unit Kerja di 2023 menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hanya unit kerja Ditama Renvaja, Badiklat PKN, dan Ditama Binbangkum yang tidak menurun diperbandingkan tahun sebelumnya, dan masih ada dua unit kerja yang menurun pada Tahun 2024 yaitu Auditorat Keuangan Negara III dan Auditorat Keuangan Negara IV. Hal tersebut dapat menandakan mayoritas unit kerja belum maksimal dalam melaksanakan peningkatan sistem akuntabilitas kinerja di setiap unit kerjanya.

Kinerja pemerintah sangat dipengaruhi oleh bagaimana keuangan negara dikelola. Ketika pengelolaan keuangan dilaksanakan secara efektif dan efisien, maka alokasi sumber daya dapat dilaksanakan secara tepat sasaran, program-program pembangunan berjalan lancar, serta pelayanan publik dapat meningkat secara signifikan. Sebaliknya, pengelolaan keuangan yang lemah seperti adanya pemborosan, penyimpangan anggaran, atau keterlambatan dalam pelaporan, dapat menghambat pencapaian tujuan pembangunan dan menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Menurut penelitian Pangaribuan dan Situmorang (2022), pemerintah daerah di Kota Batam memperoleh manfaat besar dari pengelolaan keuangan daerah yang lebih terbuka dan akuntabel. Perihal ini memperlihatkan bahwa

pemerintah daerah berfungsi lebih baik ketika ada lebih banyak akuntabilitas dan keterbukaan dalam mengelola keuangannya. Namun pengelolaan keuangan negara tidak selalu memberikan hasil yang substansial. Penelitian Anggraini (2018) tidak menemukan hubungan yang signifikan secara statistik antara kinerja pemerintah daerah dan akuntansi keuangan daerah di Kabupaten Sleman, tetapi ada korelasi yang kuat antara kepemimpinan transformasional dan pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan penelitian Noviyana dan Pratolo (2018), instansi pemerintah memerlukan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) untuk memastikan yaitu kegiatan dilaksanakan sesuai rencana dan tujuan tercapai secara terorganisasi, terkendali, efektif, dan efisien jika ingin berkinerja sebaik-baiknya. Sementara itu, PP No. 60 Tahun 2008 menyatakan yaitu pimpinan dan pekerja suatu organisasi wajib membangun sistem pengendalian intern untuk memastikan tujuan organisasi dapat tercapai dengan baik. Pengendalian internal didefinisikan oleh COSO sebagai prosedur di seluruh entitas yang dipandu oleh dewan direksi, manajemen, dan staf lainnya. Kinerja pemerintah daerah dipengaruhi secara positif oleh sistem pengendalian internal, menurut riset yang dilaksanakan oleh Mattoasi et al. (2021). Namun Avicenna dan Novita (2021) tidak menemukan hubungan yang signifikan secara statistik antara pengendalian internal dan keberhasilan bisnis pada hasil penelitiannya.

Untuk mencapai kinerja pemerintahan yang berkualitas tinggi, gagasan tata kelola yang baik sangat penting. Partisipasi, supremasi hukum, keterbukaan, daya tanggap, berorientasi pada konsensus, pemerataan, efisiensi dan efektivitas, tanggung jawab, dan visi jangka panjang merupakan beberapa prinsip tata kelola yang baik yang telah dirumuskan oleh UNDP. Tujuan tata kelola yang baik adalah untuk memastikan yaitu tujuan masyarakat dan pemerintah tidak saling bertentangan.

Good Governance berdampak positif dan signifikan kepada kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar, berdasarkan penelitian Aisyah dkk. (2014). Selanjutnya, Sulaiman dkk. (2024) menunjukkan *Good Government*

Governance berdampak kepada kinerja. Indikator *Good Government Governance* berdampak kepada kinerja organisasi, berdasarkan penelitian Hasibuan & Hasibuan (2022). *Good Government Governance* tidak berdampak kepada kinerja Pemerintah Kota Gorontalo, berdasarkan penelitian Sakinah dkk. (2024).

Penelitian ini dilaksanakan untuk mengevaluasi kembali dampak manajemen keuangan, tata kelola pemerintahan yang baik, dan sistem pengendalian internal kepada kinerja BPK. Penelitian sebelumnya tentang unsur-unsur yang dapat memengaruhi keberhasilan organisasi telah menghasilkan temuan yang beragam. Dari penelitian sebelumnya yang disebutkan dalam latar belakang masalah, jelas terlihat bahwa riset yang mengkaji kinerja lembaga pemerintah, dalam perihal ini BPK, dan yang mencakup beberapa faktor telah memberikan temuan yang saling bertentangan. Dengan mempertimbangkan masalah ini, penulis bermaksud untuk melakukan penelitian lebih lanjut untuk mengkaji dampak Tata Kelola Pemerintah yang Baik, sistem pengendalian internal, dan manajemen keuangan kepada kinerja unit kerja BPK. Pengaruh Pengelolaan Keuangan, Sistem Pengendalian Internal, dan *Good Governance* terhadap Kinerja BPK merupakan judul penelitian ini.

3. Batasan Masalah

Penelitian ini berfokus untuk mengetahui pengaruh pengelolaan keuangan, sistem pengendalian internal, dan *good governance* terhadap kinerja BPK. *Variable* independen (bebas) yang digunakan dalam penelitian ini hanya sebatas pengelolaan keuangan, sistem pengendalian internal, dan *good governance*.

4. Rumusan masalah

Perumusan masalah dapat dikembangkan dengan memakai konteks, identifikasi, dan batasan masalah yang telah dibahas sebelumnya. Tulisan ini menyajikan rumusan masalah dengan cara berikut:

- a. Apakah pengelolaan keuangan memengaruhi kinerja BPK?
- b. Apakah sistem pengendalian internal memengaruhi kinerja BPK?
- c. Apakah *Good Government* memengaruhi kinerja BPK?

B. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan permasalahan yang ada, maka tujuan dilaksanakannya penelitian ini yakni:

- 1) Menganalisis pengaruh pengelolaan keuangan kepada kinerja BPK.
- 2) Menganalisis pengaruh sistem pengendalian internal kepada kinerja BPK.
- 3) Menganalisis pengaruh *good governance* kepada kinerja BPK.

2. Manfaat Penelitian

Peneliti, objek pemeriksaan BPK, dan unit kerja BPK diharapkan dapat memperoleh manfaat dari penelitian ini. Hasil yang diharapkan dari penelitian ini akan memberikan kontribusi bagi pemahaman kita tentang unsur-unsur yang memengaruhi kinerja unit kerja BPK dan memberikan bukti yang lebih konkret tentang karakteristik tersebut. Keunggulan penelitian ini adalah:

- 1) Bagi satuan kerja di BPK, penelitian ini dengan harapan bisa memberi tambahan informasi dalam melakukan evaluasi serta membuat perencanaan untuk meningkatkan kinerja organisasi.
- 2) Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan bisa memberi tambahan informasi terkait akuntabilitas dan transparansi penggunaan anggaran publik. Penelitian dapat memberikan bukti yang mendukung pentingnya pengelolaan keuangan, sistem pengendalian internal, dan *good governance* dalam memastikan penggunaan dana publik yang efisien dan bertanggung jawab melalui kinerja satuan kerja di BPK.
- 3) Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan bisa memperkaya wawasan mengenai kinerja satuan kerja di BPK dan dapat dijadikan sebagai dasar referensi bagi penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2020). *Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan BPK*. <https://peraturan.bpk.go.id>
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2020). *Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja dan Anggaran BPK*. <https://peraturan.bpk.go.id>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47. <https://peraturan.bpk.go.id>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2006). *Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85. <https://peraturan.bpk.go.id>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 129. <https://peraturan.bpk.go.id>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2005). *Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140. <https://peraturan.bpk.go.id>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2008). *Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127. <https://peraturan.bpk.go.id>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92. <https://peraturan.bpk.go.id>
- Abdurrahman, A. (2021). Implementasi pengendalian internal berdasarkan COSO framework dan good corporate governance terhadap kinerja perusahaan: Studi kasus pada PT. Reasuransi Syariah Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 10(1), 1–10.
- Aisyah, S., Nurlis, I., & Wahyuni, A. (2014). Pengaruh good governance, gaya kepemimpinan, komitmen organisasi dan budaya organisasi terhadap kinerja pemerintah daerah (Studi pada pemerintah daerah Kabupaten Kampar). *Jurnal Ekonomi Universitas Riau*.

- Alamri, S., Wuryandini, A. R., & Panigoro, N. (2024). Pengaruh GGG (Good Government Governance) dan sistem pengendalian internal terhadap kinerja pemungutan retribusi sampah oleh Pemerintah Kota Gorontalo: Studi kasus Dinas Lingkungan Hidup Kota Gorontalo. *Economic Reviews Journal*, 3(3), 888–903.
- Amin, M., Maryadi, M., & Sjarlis, S. (2022). Pengaruh pengawasan keuangan, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan terhadap kinerja anggaran. *Nobel Management Review*, 3(3), 438–451.
- Anggraini, F. A. (2018). Pengaruh pengelolaan keuangan daerah dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah di Kabupaten Sleman (Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta). <https://e-journal.uajy.ac.id/>
- Aprianto, F., Ngadisah, & Lukman, S. (2020). Pengaruh sistem informasi kepegawaian daerah dan sistem pengendalian internal terhadap kinerja aparatur sipil negara Pemerintah Daerah Kota Tangerang Provinsi Banten. *VISIONER: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia*, 12(4), 663–674.
- Arens, A. A., Elder, R. J., Beasley, M. S., & Hogan, C. E. (2017). *Auditing and assurance services: An integrated approach* (16th ed.). Pearson.
- Arifin, J., & Isnurhadi, I. (2017). Stewardship theory dan kinerja organisasi sektor publik: Studi pada pemerintah daerah di Indonesia. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi*, 24(2), 86–94.
- Badan Pemeriksa Keuangan RI. (2024). *Laporan kinerja Badan Pemeriksa Keuangan RI tahun 2024*. BPK RI.
- CNN Indonesia. (2022, April 28). Kepala BPK Jabar dicopot usai OTT KPK terkait suap Bupati Ade Yasin. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220428050411-12-790705/kepala-bpkjabar-dicopot-usai-ott-kpk-terkait-suap-bupati-ade-yasin>
- Damayanti, E., & Hermanto, S. B. (2018). Pengaruh akuntabilitas, transparansi dan pengendalian internal terhadap kinerja pemerintah. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 7(3).
- Davis, J. H., Schoorman, F. D., & Donaldson, L. (1997). Toward a stewardship theory of management. *Academy of Management Review*, 22(1), 20–47.
- Djalil, R. (2014). *Mewujudkan good governance melalui pengawasan*. Salemba Empat.

- Hair, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2022). *A primer on partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM)* (3rd ed.). Sage.
- Harun, H., An, Y., & Duff, C. (2020). Political, bureaucratic and professional influences in performance measurement: Insights from an Indonesian local government. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 33(1), 160–184.
- Hasibuan, N. F. A. (2022). Pengaruh good government governance terhadap kinerja pegawai Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi Samudra*, 3(4), 183–195.
- Jatmiko, B. (2020). Pengaruh pengawasan internal, akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten Sleman (Survei pada seluruh satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Sleman). *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 7(2), 231–246.
- Jitmau, F., Kalangi, L., & Lambey, L. (2017). Pengaruh akuntabilitas, transparansi dan fungsi pemeriksaan intern terhadap kinerja pemerintah daerah (Studi empiris di Kabupaten Sorong). *E-Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi*.
- Latan, H., & Ghazali, I. (2015). *Partial least squares: Konsep, teknik dan aplikasi SmartPLS 2.0 M3 untuk penelitian empiris*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Mahsun, M. (2015). *Pengukuran kinerja sektor publik*. BPFE-Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi sektor publik* (edisi terbaru). Andi.
- Mattoasi, M., Musue, D. P., & Rauf, Y. (2021). Pengaruh sistem pengendalian internal pemerintah terhadap kinerja pemerintah daerah. *Jambura Accounting Review*, 2(2), 100–109.
- Mutriani, T. (2023). Pengaruh tingkat transparansi pengelolaan keuangan terhadap tingkat kinerja pemerintah pada daerah Kabupaten Pandeglang (Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan).
- Nofianti, L., & Suseno, N. S. (2015). Factors affecting implementation of good government governance (GGG) and their implications towards performance accountability. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 164, 98–105. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.11.058>
- Noviyana, R. A., & Pratolo, S. (2018). Pengaruh sistem pengendalian intern dan motivasi kerja terhadap kinerja instansi pemerintah dengan akuntabilitas

- publik sebagai variabel intervening: Studi pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Klaten. *Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia*, 2(2), 129–143.
- Nugraha, D. S., & Susanti, A. (2010). Pengaruh sistem pengendalian intern terhadap keandalan laporan keuangan (Studi pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat). Program Studi Universitas Komputer Indonesia.
- Pangaribuan, J., & Situmorang, H. H. (2024). Analisis pengaruh akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah Kota Batam. *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan*, 10(1), 1–19.
- Rahmani, T. N. (2023). Pengaruh terhadap sistem pengendalian intern serta good government governance terhadap kinerja dinas pemerintah Kota Bandung. *Journal of Economics, Finance, and Social Science Review (JEFSOR)*, 1(1), 23–37.
- Robbins, S. P., & Coulter, M. (2016). *Manajemen* (Jilid I; T. Hermaya, Trans.). PT Indeks Kelompok Gramedia. (Original work published 2012)
- Sari, D. P., & Mulyani, S. (2019). Pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kinerja instansi pemerintah daerah. *Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma*, 10(2), 282–294.
- Sedarmayanti, S., Gunawan, S., Pradesa, H. A., & Sitorus, T. A. T. (2019). The effect of good governance, leadership and organizational culture on public performance accountability. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 10(1), 70–81. <https://doi.org/10.6007/IJARBSS/v10-i1/6835>
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2019). *Research methods for business: A skill building approach* (8th ed.). Wiley.
- Silvida, F. R., & Fadlli, M. D. F. (2024). Analisis pengaruh pengelolaan anggaran terhadap kinerja keuangan dan pencapaian visi pemerintah daerah Kabupaten Mojokerto. *Elastisitas: Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 6(2), 20–26.
- Subekti, I., & Widodo, A. (2019). Pengaruh gaya kepemimpinan dan etika organisasi terhadap kinerja auditor dengan pendekatan stewardship theory. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 10(1), 123–139.
- Sugiyono. (2020). *Metode penelitian: Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sulaiman, S., Nizam, A., Farid, F., Kesuma, T. M., Madjid, I., & Siregar, R. (2019, January). The role of good government governance principles in

enhancing the performance of public organization in Aceh, Indonesia. In *1st Aceh Global Conference (AGC 2018)* (pp. 731–738). Atlantis Press. <https://doi.org/10.2991/agc-18.2019.109>

Supriatna, N. (2016). Pengaruh implementasi sistem pengendalian internal terhadap kinerja instansi pemerintah (Studi kasus pada organisasi perangkat daerah Pemerintah Kota Bandung). *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 4(1), 941–948.

Susanto, A. (2017). *Sistem informasi akuntansi: Struktur, pengendalian risiko, dan pengembangan*. Lingga Jaya.

Syawie, H. A., Nangoi, G. B., & Kalangi, L. (2018). Pengaruh pemahaman pengelolaan keuangan, sistem akuntansi keuangan daerah, dan efektivitas pengawasan intern terhadap kinerja keuangan pada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing "Goodwill"*, 8(2), 75–84.

Wiyono, G. (2020). *Merancang penelitian bisnis dengan SPSS*. STIM YKPN.

Yang, M. R. P., & Suartana, I. W. (2017). Pengaruh good governance, pengelolaan keuangan daerah dan sistem pengendalian intern pemerintah pada kinerja pemerintah daerah. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 21(2), 1346–1372. <https://doi.org/10.24843/EJA.2017.v21.i02.p18>

Zhang, X. (2019). *Good governance, good enough governance and governance with rights first* (Doctoral dissertation, University of California, Los Angeles).